

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, menghasilkan berbagai inovasi baru. Salah satu bidang yang mengalami perkembangan signifikan adalah Sistem Pendukung Keputusan (SPK), yang berfungsi untuk membantu dan mempermudah proses pengambilan keputusan. Saat ini, SPK sangat bermanfaat bagi organisasi, perusahaan, instansi, dan lainnya jika diterapkan dengan benar. Mungkin dengan adanya sistem ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, terutama untuk Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun, karena dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaan karyawan atau pegawai khusus PKH.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah rangkaian proses dan mekanisme yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data, yang kemudian diuji dan dijadikan panduan untuk mengidentifikasi masalah-masalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Salah satu metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan adalah metode *Vise Kriterijumsko Kompromisno Rangiranje* (VIKOR). SPK berfungsi sebagai sistem objektif yang membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat penggunaan SPK meliputi solusi yang lebih cepat dengan hasil yang dapat diandalkan, meyakinkan pengambil keputusan terhadap keputusannya, serta memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya (Satria, 2023)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat digambarkan sebagai sistem

yang mendukung analisis data dan pemodelan keputusan, berorientasi pada keputusan dan perencanaan masa depan, serta digunakan pada saat-saat yang tidak biasa. Menurut Keen dan Scoot Morton, Sistem Pendukung Keputusan merupakan penggabungan sumber-sumber kecerdasan individu dengan kemampuan komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Sistem Pendukung Keputusan juga merupakan sistem informasi berbasis komputer untuk manajemen pengambilan keputusan yang menangani masalah-masalah semi-terstruktur (Susanti, 2019)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa SPK bukanlah alat pengambil keputusan, melainkan sistem yang membantu pengambil keputusan dengan menyediakan informasi relevan dari data yang telah diolah, yang diperlukan untuk membuat keputusan mengenai suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pengambil keputusan dalam proses pembuatan keputusan (Susanti, 2019)

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Abdul Chamid yang berjudul “Penerapan Metode Topsis Untuk Menentukan Prioritas Kondisi Rumah” metode tophis dapat membantu dalam menentukan solusi yang paling optimal berdasarkan berbagai faktor yang dipertimbangkan. Metode TOPSIS adalah metode multi-kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi solusi dari himpunan alternatif dengan cara meminimalkan jarak dari titik ideal dan memaksimalkan jarak dari titik terendah. Selain itu, TOPSIS mampu menggabungkan bobot relatif dari kriteria-kriteria penting (Chamid, 2019)

Penerapan metode TOPSIS dalam seleksi penerima Program Keluarga

Harapan di Kantor Lurah Sitirejo mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan efisien. Metode ini memberikan manfaat signifikan dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang layak menerima bantuan berupa uang, sembako, dan dukungan pendidikan bagi anak-anak mereka. Metode TOPSIS dapat meningkatkan akurasi dan keadilan dalam distribusi bantuan sosial di wilayah tersebut (Valentine et al., 2022)

Terkadang, program bantuan itu tidak jatuh kepada pihak yang tepat, sehingga dapat memicu rasa ketidakadilan terhadap keluarga miskin lainnya. Jumlah masyarakat miskin di desa lebih banyak daripada kuota penerima bantuan, sehingga menyulitkan perangkat desa dalam menyeleksi keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Proses seleksi yang masih dilakukan secara manual terkadang menghasilkan keputusan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria penerima bantuan, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan perangkat desa. Maka peneliti memutuskan membuat Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan menggunakan metode *Simple Multi Attribute Rating Technique* (SMART) (Nurmaya et al., 2022)

Dari permasalahan diatas, menurut (Nurmaya et al., 2022) perlu adanya pengembangan sistem pendukung keputusan yang bertujuan memberikan rekomendasi kepada perangkat desa untuk menentukan keluarga yang menjadi penerima PKH sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Aparat desa akan memberikan nilai dan bobot yang sesuai untuk setiap kriteria, dan nilai serta bobot tersebut nantinya akan digunakan untuk mendapatkan alternatif terbaik. Alternatif yang dimaksud adalah keluarga yang memenuhi kriteria sehingga

dapat digolongkan sebagai keluarga miskin. Selain itu, sistem ini juga mampu mengelola data masyarakat desa dengan cepat dan akurat, serta memberikan hasil keputusan evaluasi rumah tangga miskin yang memenuhi kriteria

Berdasarkan penguraian diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah bahwa adanya kesulitan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan PKH berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Maka dari permasalahan tersebut penulis ingin mengangkat judul penelitian yaitu: Penentuan Kelayakan Penerima Bantuan Program Keluarga Manajemen Pada Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun Menggunakan Metode *Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution* (Topsis).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas pada laporan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode *Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution* (Topsis) dapat digunakan untuk memberikan kelayakan penerima bantuan PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun ?
2. Bagaimana merancang analisa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan secara objektif oleh penulis dengan menggunakan Metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS)?
3. Bagaimana merancang sebuah sistem pengambilan keputusan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam menentukan pemilihan penerima bantuan PKH di kabupaten sarolangun ?

1.3 Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara dimana nantinya akan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang ada dapat dikemukakan beberapa hipotesa sebagai berikut:

1. Penerapan Metode *Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution* (Topsis) Diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kelayakan penerima bantuan PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun
2. Dengan merancang sistem penilaian penerima bantuan PKH menggunakan metode TOPSIS yang didasarkan pada kriteria dan bobot yang telah ditentukan, Diharapkan hasil penentuan penerima bantuan PKH di Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun akan lebih efisien.
3. Diharapkan Dengan adanya sebuah sistem pengambilan keputusan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dapat membantu pihak dinas sosial kabupaten sarolangun dalam menentukan keluarga yang berhak menerima PKH dengan tepat sasaran.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tujuan dari penulis ini tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di dinas sosial kabupaten sarolangun
2. Penelitian ini mencakup pada evaluasi dan perbandingan antara metode konvensional yang sudah ada dalam penentuan kelayakan penerima bantuan PKH dengan metode TOPSIS
3. Penelitian ini memfokuskan periode tertentu, mempertimbangkan ketersediaan data yang relevan dari Dinas Sosial Sarolangun

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai antaranya adalah:

1. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) dalam menentukan kelayakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Sarolangun.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak implementasi sistem penentuan kelayakan penerima bantuan PKH dengan metode TOPSIS terhadap efisiensi manajemen di Dinas Sosial Sarolangun. Analisis akan mencakup peningkatan kinerja, pengelolaan data, dan integrasi sistem yang dapat mendukung optimalisasi proses manajemen
3. Penelitian ini bertujuan agar sebuah sistem mampu memberikan solusi yang sesuai dan tepat dengan menggunakan metode TOPSIS.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses seleksi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga bantuan dapat lebih tepat sasaran.
2. Dengan mengimplementasikan metode TOPSIS, diharapkan dapat terjadi peningkatan efisiensi dalam manajemen Dinas Sosial Sarolangun, khususnya dalam pengelolaan data dan proses keputusan.
3. Penelitian ini diarahkan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan berbasis data di Dinas Sosial Sarolangun, memberikan dasar yang lebih kuat

untuk menilai kelayakan penerima bantuan PKH secara objektif.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas sosial kabupaten sarolangun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial. Kepala dinas saat ini adalah bapak Helmi, SH. MH. Alamat kantor: Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kel. Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun - Jambi Telp : 0745 – 91636 Fax : 0745 – 91100

1.7.1 Visi dan Misi dinas sosial kabupaten sarolangun

Dikutip dari website resmi dinas sosial kabupaten sarolangun, visi dan misi dari dinas sosial kabupaten sarolangun adalah:

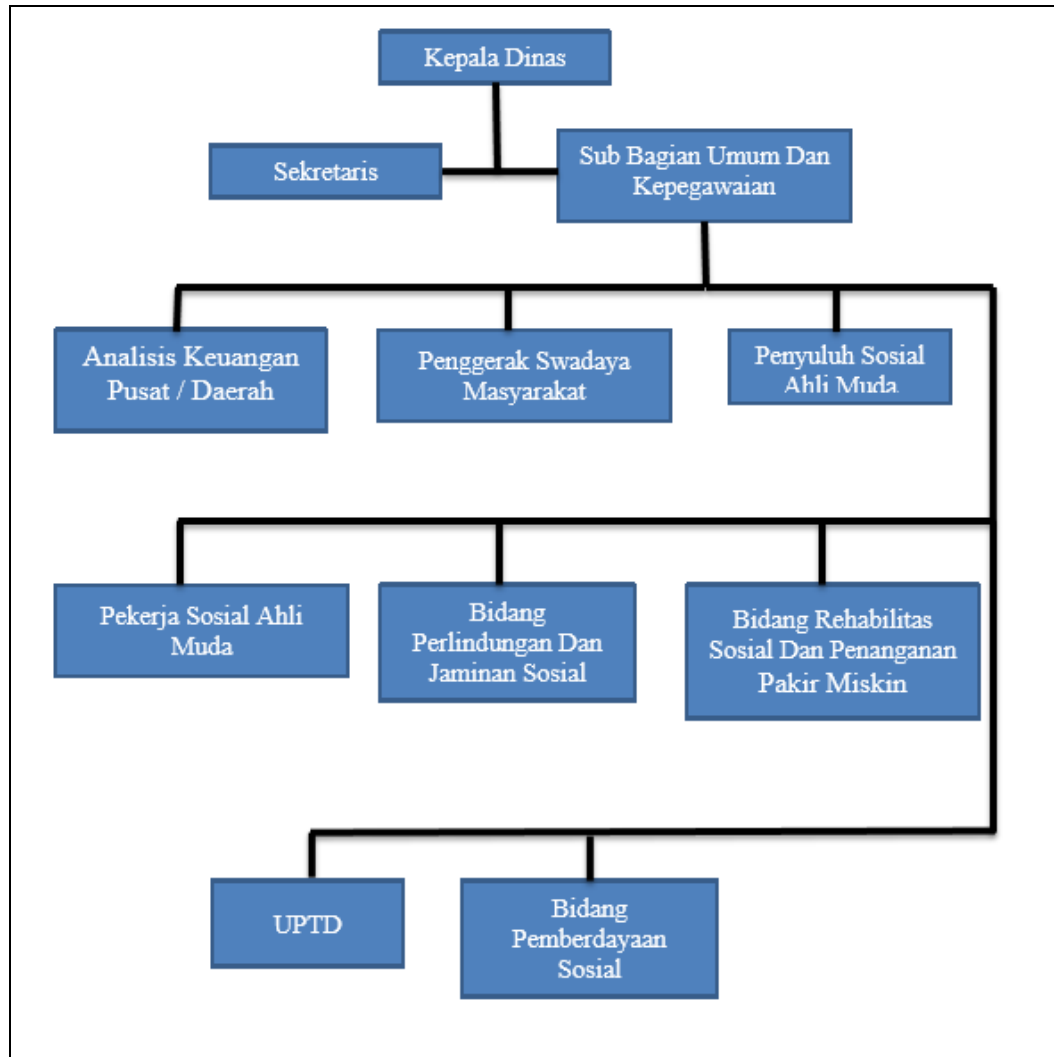
1. Visi

SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA

2. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Umum.
- 2) Meningkatkan Kualitas SDM, Penguatan Nilai-nilai Agama Dan Sosial Budaya.
- 3) Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal.
- 4) Alam Yang Optimal Dan Berkelanjutan. Meningkatkan Pengelola Sumberdaya
- 5) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Responsip Gender

1.7.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun



Sumber: Dinas Sosial Kab. Sarolangun

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Sarolangun

1.7.3 Fungsi dan Tugas

Berikut adalah uraian fungsi dan tugas pengelola sekolah:

1. Kepala dinas

Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Sosial bertanggung jawab untuk mengelola administrasi kantor, menyusun agenda dan notulensi rapat, menangani komunikasi internal dan eksternal, mengelola jadwal Kepala Dinas, menyusun laporan, memelihara fasilitas kantor, menerima tamu, berkoordinasi dengan bagian lain, dan melaksanakan tugas tambahan yang berkaitan dengan fungsi administratif.

3. Subbagian umum dan kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki peran dalam manajemen kepegawaian, pengelolaan arsip, pelayanan umum, pengadaan barang dan jasa, koordinasi pelatihan, pengelolaan keuangan, pembinaan pegawai, dan pengelolaan surat-menyurat. Tugasnya mencakup administrasi kepegawaian, pemeliharaan fasilitas, pengadaan, dan aspek umum kantor.

4. Analisis keuangan pusat/daerah ahli muda

Analisis Keuangan atau Financial Analyst adalah profesi yang menganalisis data keuangan, mempelajari data keuangan, dan melakukan pengolahan data laporan keuangan.

5. Penggerak swadaya masyarakat ahli muda
melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pergerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan keberlanjutan wilayah desa.
6. Penyuluh sosial ahli muda
Tugas Pokok Penyuluh Sosial adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial dilakukan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pihak yang mengadakan kegiatan
7. Pekerja sosial ahli muda
Tugas utama pekerja sosial yaitu memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan nilai-nilai pekerjaan sosial
8. Bidang perlindungan dan jaminan sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.
9. Bidang rehabilitasi sosial dan penanganan fakir miskin
Bidang rehabilitasi Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

10. Bidang pemberdayaan sosial

Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemberdayaan Sosial.

11. UPTD.

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.